



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA
MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI
KECAMATAN WARUNGKIARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Nomor 02 Tahun 2010, tentang Pemekaran Desa Bojongkerta menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Bojongkerta telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Bojongkerta Menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam Selokan Cilawang, Selokan Ciwarangan, Lamping Kubang, dan batas buatan berupa patok dan Saluran Irigasi.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Bojongkerta memiliki luas Wilayah ± 980,4 Ha, dan jumlah Penduduk 7.732 Jiwa, 2.166 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 24 Rukun Warga dan 62 Rukun Tetangga.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Bojongkerta (desa induk) dan
- b. Desa Kertamukti (desa pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Bojongkerta di bagian Utara sedangkan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara di bagian Selatan.

Pasal 7

Desa Bojongkerta memiliki Luas Wilayah ± 633 Ha, jumlah penduduk 5.320 jiwa dan 1.404 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 15 Rukun Warga, dan 39 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cibungur dan Jalan PTPN VIII;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai Cicatih;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cilawang, Selokan Ciwarangan, Lamping Kubang dan patok;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh jalan perkebunan PTPN VIII.

Pasal 8

Desa Kertamukti memiliki luas Wilayah ± 347,4 Ha, dan jumlah penduduk 2.412 jiwa, 762 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 9 Rukun Warga, 23 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cilawang, Selokan Ciwarangan, dan Lamping Kubang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu dan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai Cicatih;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai Cicatih;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara yang dibatasi Selokan Cilawang.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Bojongkerta terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Sorog; dan
 - b. Dusun Sindangkerta;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Bojongkerta berada di Dusun Sindangkerta.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Kertamukti terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Bojongkerta; dan
 - b. Dusun Cilulumpang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Kertamukti berada di Dusun Bojongkerta.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Bojongkerta sebelum dimekarkan meliputi :

- a. tanah desa seluas $\pm 42.600 \text{ M}^2$, terdiri atas :
 1. kantor Desa berlokasi di Dusun Sindangkerta seluas : $\pm 800 \text{ M}^2$;
 2. tanah kas Desa berupa sawah/bengkok berlokasi di Dusun Sorog seluas : $\pm 2.200 \text{ M}^2$;
 3. tanah Titisara seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$, berlokasi di :
 - a) Dusun Sorog seluas : $\pm 6.800 \text{ M}^2$;
 - b) Dusun Sindangkerta seluas : $\pm 4.400 \text{ M}^2$;
 - c) Dusun Bojongkerta seluas : $\pm 2.800 \text{ M}^2$;
 - d) Dusun Cilulumpang seluas : $\pm 4.000 \text{ M}^2$.
 4. Pemakaman Umum seluas $\pm 21.600 \text{ M}^2$, berlokasi di :
 - a) Dusun Sindangkerta seluas : $\pm 1.600 \text{ M}^2$;
 - b) Dusun Bojongkerta seluas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - c) Dusun Cilulumpang seluas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
- b. bangunan kantor Desa beserta isinya; dan
- c. 3 (tiga) buah kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One tahun 2011 Inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Desa Bojongkerta mendapat bagian Kekayaan Tanah Desa ± 14.800 M², terdiri atas :

- a. tanah Bengkok sawah berlokasi di Dusun Sorog seluas : ± 1.200 M²;
- b. tanah Titisara seluas ± 12.000 M², dipergunakan:
 1. Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Sorog dan Dusun Dwitunggal seluas : ± 3.200 M²;
 2. 9 (Sembilan) Mesjid di Dusun Sorog seluas : ± 4.400 M²;
 3. bangunan Kantor Desa di Dusun Sindangkerta seluas : ± 800 M²;
 4. bangunan Sekolah Dasar Negeri berlokasi di Dusun Sindangkerta seluas : ± 1.600 M²;
 5. Puskesmas Pembantu berlokasi di Dusun Sindangkerta seluas : ± 800 M²;
 6. mesjid sebanyak 3 (tiga) buah berlokasi di Dusun Sindangkerta seluas : ± 1.200 M².
- c. pemakaman umum berlokasi di Dusun Sindangkerta seluas : ± 1.600 M²;
- d. bangunan Kantor Desa beserta isinya;
- e. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo tahun 2009, merek Honda CS One tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Kertamukti mendapat bagian Kekayaan Desa seluas ± 27.800 M² terdiri dari :

- a. tanah kas Desa (Bengkok Desa) berupa Sawah yang berlokasi di Dusun Sorog Desa Bojongkerta seluas : ± 1.000 M².
- b. tanah titisara seluas ± 6.800, berlokasi di :
 1. Dusun Bojongkerta seluas ± 2.800 M², dipergunakan:
 - a) SDN Bojongkerta seluas : ± 1.600 M²;
 - b) 3 (tiga) Mesjid seluas : ± 1.200 M².
 2. Dusun Cilulumpang seluas ± 4.000 M², dipergunakan:
 - a) SDN Sukabakti seluas : ± 2.400 M²;
 - b) 4 (empat) Mesjid seluas : ± 1.600 M².
- c. Tanah Pekuburan seluas ± 20.000 M², berlokasi di :
 - a. Dusun Bojongkerta : ± 10.000 M²;
 - b. Dusun Cilulumpang : ± 10.000 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Bojongkerta menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Kertamukti, Kepala Desa Bojongkerta menyerahkan asset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Kertamukti secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Desa Bojongkerta dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Bojongkerta tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Bojongkerta sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Kertamukti, BPD Bojongkerta mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Kertamukti, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 8

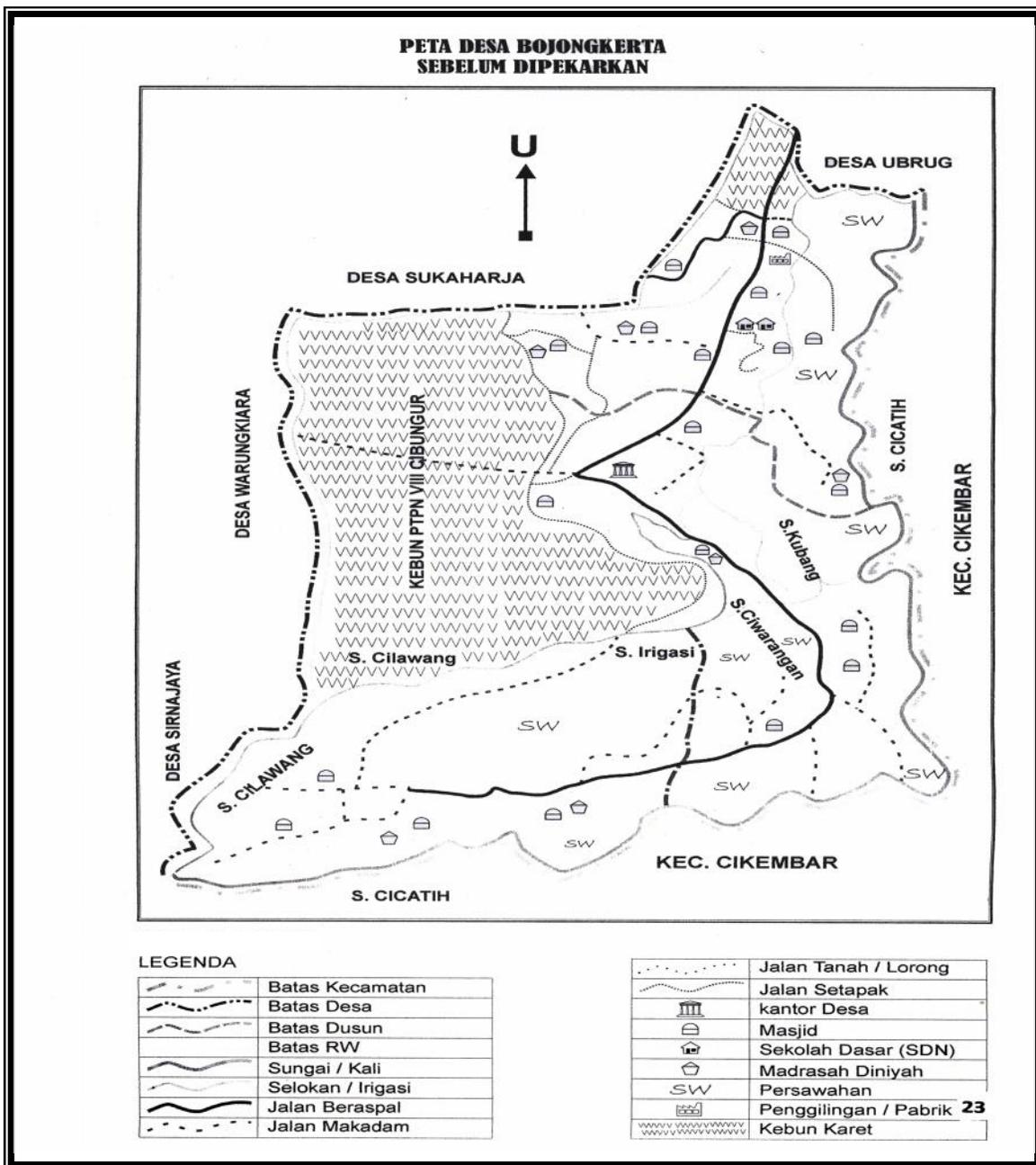
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 8 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA

PETA DESA BOJONGKERTA KECAMATAN WARUNGKIARA



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

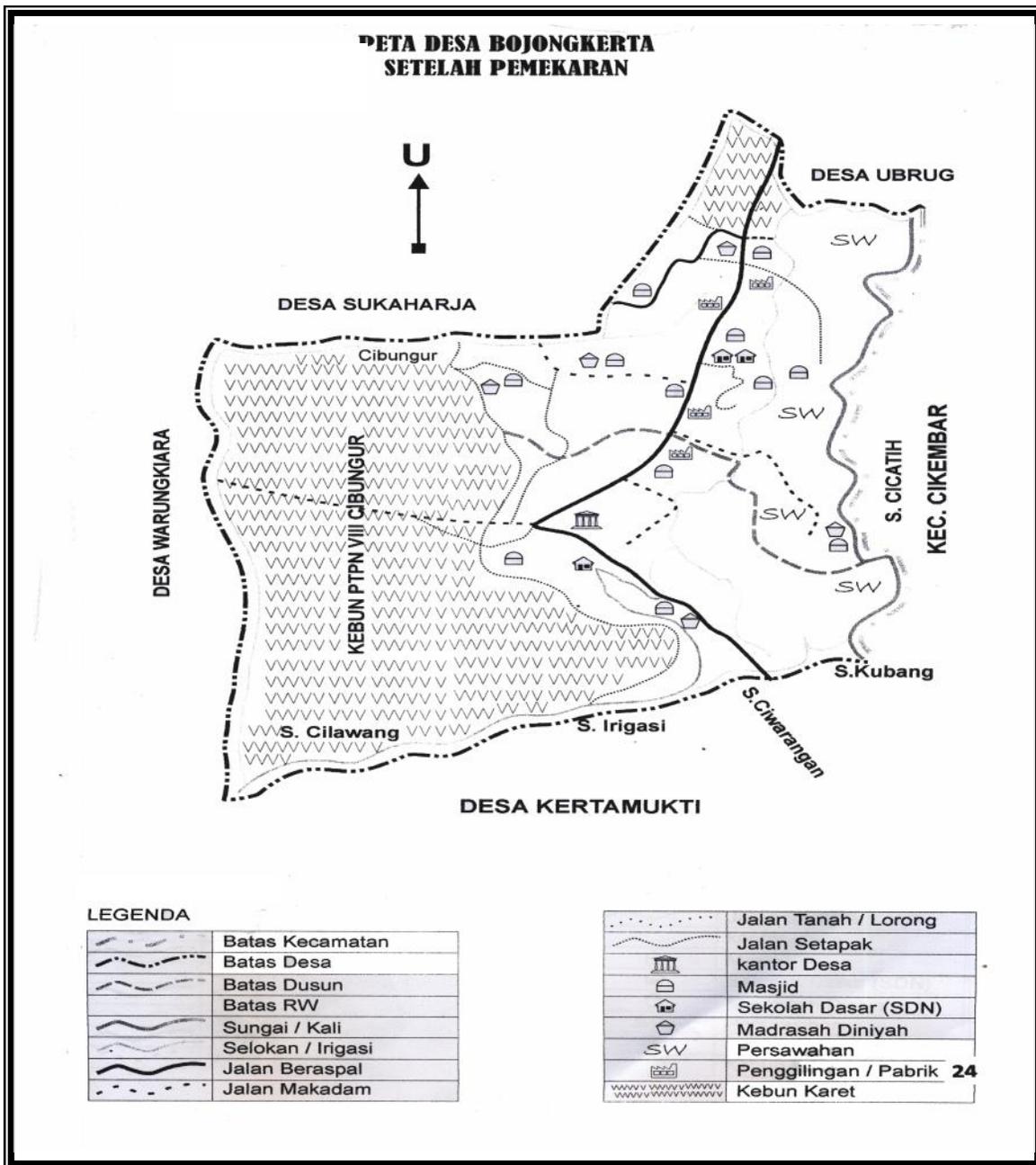
NOMOR : 8 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA

PETA DESA BOJONGKERTA KECAMATAN WARUNGKIARA

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

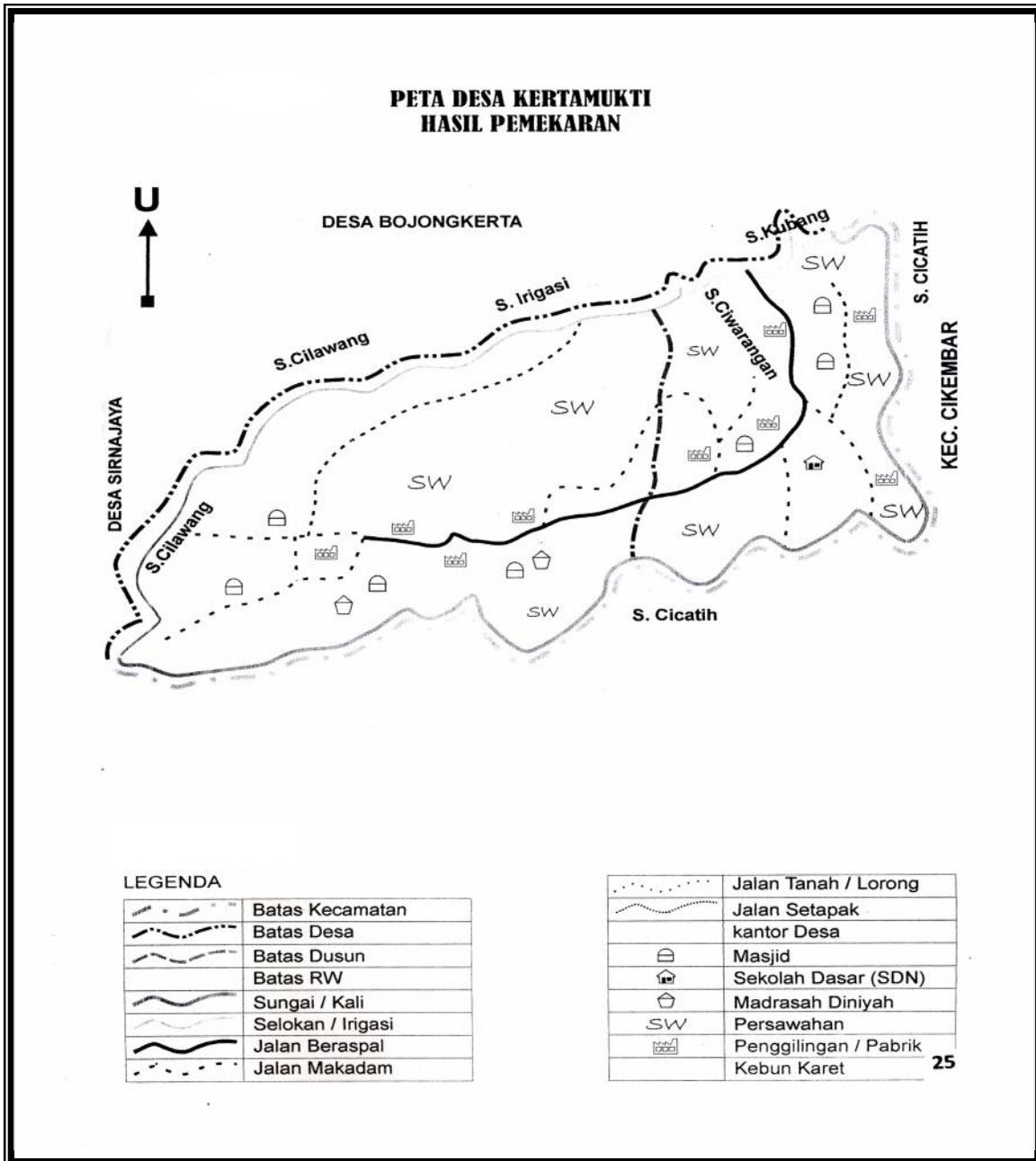
NOMOR : 8 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA

PETA DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA
MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI
KECAMATAN WARUNGIARA

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratraktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.